

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Nasution, Bismar, 2001, *Keterbukaan dalam Pasar Modal*, Jakarta :

Universitas Indonesia.

Rahadiyan, Inda, 2014, *Hukum Pasar Modal di Indonesia Pengawasan Pasar*

Modal Pasca Terbentuknya Otoritas Jasa Keuangan, Yogyakarta : UII

Press

Sutedi, Adrian, 2009, *Segi-Segi Hukum Pasar Modal*, Bogor : Ghalia

Indonesia.

Tavinayati dan Yulia Qamariyanti, 2009, *Hukum Pasar Modal di Indonesia*,

Jakarta : Sinar Grafika

Untung, Budi, 2011, *Hukum Bisnis Pasar Modal*, Yogyakarta : Andi.

Usman, Marzuki, et.al, 1994, *ABC Pasar Modal Indonesia*, Jakarta : IBI

Usman, Marzuki, Singgih Riphath, Syahrir Ika, 1997, *Pengetahuan Dasar*

Pasar Modal, Jakarta : Institut Bankir Indonesia bekerjasama dengan

Badan Analisa Keuangan dan Moneter, Departemen Keuangan R.I

Salim, Agus, 2006, *Teori dan Paradigma Penelitian Sosial*, Yogyakarta :

Kaliurang K. 7,8

Soekanto, Soerjono, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Pres

B. Website

Berita Satu, 2014, *Konsultan Hukum, Notaris, Akuntan Gugat PP OJK ke MA*,

diakses dari <http://www.beritasatu.com/hukum/217990-konsultan-notaris-dan-akuntan-gugat-pp-ojk-ke-ma.html>

Nindyo & Associates, 2015, Service, diakses dari <http://nindyo-associates.com/n/front.swf>

Otoritas Jasa Keuangan, 2014, FAQ Otoritas Jasa Keuangan, diakses dari <http://www.ojk.go.id/id/Pages/FAQ-Otoritas-Jasa-Kuangan.aspx>

STIE YKPN, *Konsep Dasar Perpajakan*, diakses dari www.stieykpn.ac.id

C. Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1995 No. 64, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia No. 3608

Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2003 No. 49, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia No. 4288

Undang-Undang No. 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik, Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2011 No. 51, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia No. 5215

Undang-Undang No. 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 No. 111, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia No. 5253

Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.

30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 No. 3, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia No. 5491

Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2014 tentang Pungutan oleh OJK, Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No. 33, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia No. 5504

Peraturan Menteri Keuangan No. 101/PMK.01/2014 tentang Penilai Publik, Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No. 719

Peraturan Nomor VIII.D.1 Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar

Modal Nomor KEP-37/PM/1996 tentang Pendaftaran Notaris yang

Melakukan Kegiatan di Pasar Modal

Peraturan Nomor X.J.1, Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar

Modal Nomor KEP-79/PM/1996 tentang Laporan Kepada Bapepam oleh

Akuntan

Peraturan Nomor VIII.A.1, Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar

Modal dan Lembaga Keuangan Nomor : KEP-41/BL/2008 tentang

Pendaftaran Akuntan yang Melakukan Kegiatan di Pasar Modal

Peraturan Nomor VIII.C.2, Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar

Modal dan Lembaga Keuangan Nomor : KEP – 394/BL/2008 tentang

Independensi Penilai yang Melakukan Kegiatan di Pasar Modal

Peraturan Nomor X.J.2, Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar

Modal dan Lembaga Keuangan Nomor : KEP-395/BL/2008 tentang

Laporan Berkala Kegiatan Akuntan

Peraturan Nomor VIII.C.4 Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar

Modal dan Lembaga Keuangan Nomor : KEP-478/BL/2009 tentang

Pedoman Penilaian dan Penyajian Laporan Penilaian Properti di Pasar

Modal

Peraturan Nomor VIII.B.1, Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar

Modal dan Lembaga Keuangan No.KEP-16/BL/2011 tentang Pendaftaran

Konsultan Hukum Yang Melakukan Kegiatan Di Pasar Modal

Peraturan Nomor VIII.A.2, Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar

Modal dan Lembaga Keuangan Nomor : KEP-86/BL/2011 tentang

Independensi Akuntan yang Memberikan Jasa di Pasar Modal

Peraturan Nomor VIII.C.1, Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar

Modal dan Lembaga Keuangan Nomor : KEP-372/BL/2012 tentang

Pendaftaran Penilai yang Melakukan Kegiatan di Pasar Modal

Peraturan Nomor VIII.C.3 Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar

Modal dan Lembaga Keuangan Nomor : KEP-196/BL/2012 tentang

Pedoman Penilaian dan Penyajian Laporan Penilaian Usaha di Pasar

Modal

Peraturan Nomor VIII.C.5 Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar

Modal dan Lembaga Keuangan Nomor : KEP – 620 /BL/2011 tentang

Penilaian dan Penyajian Laporan Penilaian Aset Tak Berwujud di Pasar

Modal

Peraturan Nomor X.J.4 Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal

dan Lembaga Keuangan Nomor KEP – 396/BL/2008 tentang Laporan

Berkala Kegiatan Penilai

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.02/2014 tentang Tata Cara

Pelaksanaan Pungutan oleh Otoritas Jasa Keuangan, Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 66

Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/SEOJK.02/014 tentang

Pembayaran Pungutan Otoritas Jasa Keuangan

Standar Profesi Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal, Lampiran Keputusan

HKHPM No. KEP. 01/HKHPM/2005